

## Selandia Baru Buka Perbatasan dengan Australia Tahun Depan

WELLINGTON(IM)

- Selandia Baru mengumumkan bahwa kabinet sepakat membuka perbatasan dengan Australia awal tahun depan.

"Rapat kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Jacinda Ardern sepakat membuka perjalanan dengan Australia awal tahun depan," papar laporan Radio Selandia Baru.

Gelembung perjalanan dengan Australia dapat diperkirakan terjadi pada kuartal pertama 2021 menunggu konfirmasi dari Kabinet Australia dan tidak ada perubahan keadaan di kedua negara," ungkap Ardern. "Tanggal untuk perjalanan bebas karantina trans-Tasman akan diumumkan di tahun baru," ujar dia.

Namun, Ardern mengatakan rencana yang jelas perlu dibuat untuk para pelancong jika terjadi wabah lagi sehingga perbatasan ditutup kembali.

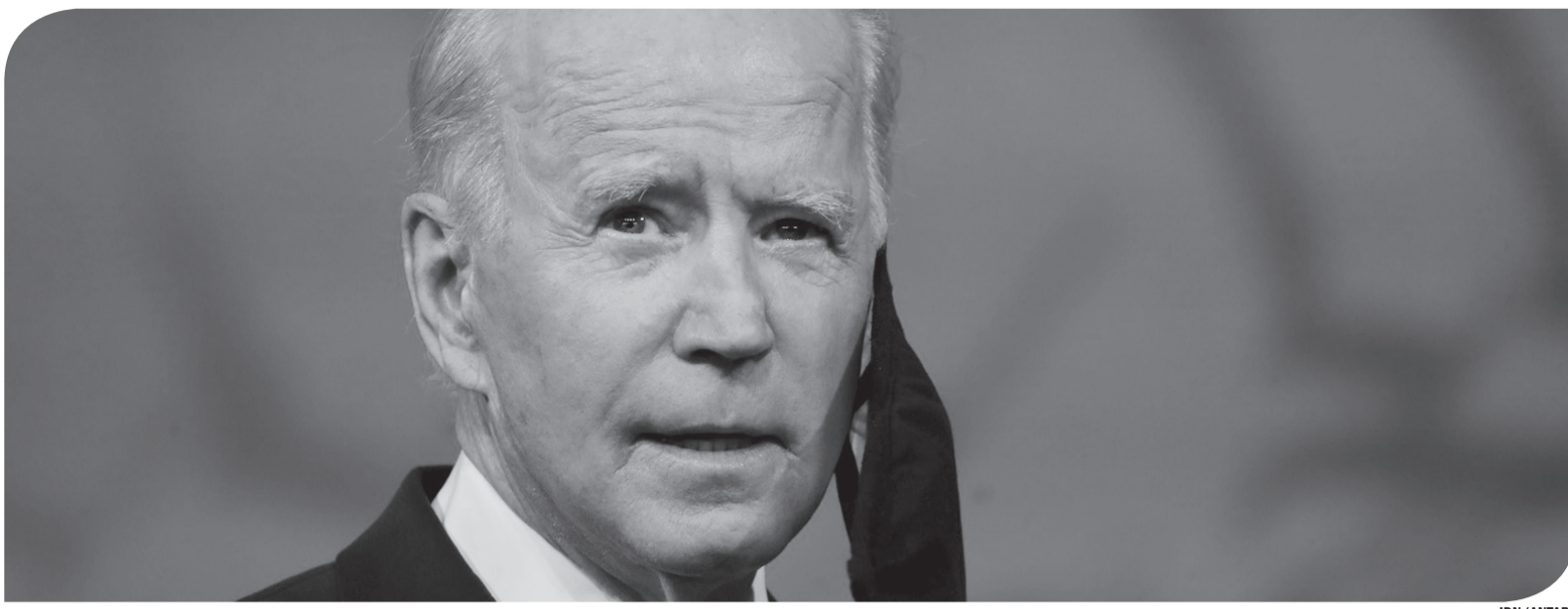
Sementara itu, Australia menyambut baik pengumuman tersebut, menggambarannya sebagai "paruh kedua dari persamaan". "Pemerintah Australia menyambut baik pengumuman Selandia Baru dan

pemerintah federal secara mutlak akan menyetujui perjanjian tersebut," ungkap Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt.

"Kami secara sadar membuka Australia bagi orang-orang yang datang dari Selandia Baru karena jumlah kasus mereka dapat diabaikan dan kami tahu akan tiba saatnya ketika jumlah kasus kami akan memberi mereka kepercayaan," ujar Hunt.

Dia menambahkan, "Ini adalah langkah pertama untuk kembali ke normalitas internasional." Pada Oktober, Australia membuka perbatasannya dan mengizinkan perjalanan bebas karantina dari Selandia Baru, setelah pelonggaran pembatasan terhadap virus corona.

Saat ini, semua negara bagian telah membuka perbatasan dan perjalanan bebas karantina bagi warga Selandia Baru, kecuali Australia Barat yang masih mewajibkan karantina 14 hari pada saat kedatangan. Sejauh ini, Australia melaporkan 28.037 kasus dengan 908 kematian, menurut Universitas Johns Hopkins yang berbasis di AS. Selandia Baru mencatat 2,096 kasus dan 25 kematian sejauh ini. ● gul



IDN/ANTARA

### PIDATO PRESIDEN AS TERPILIH JOE BIDEN

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden melepas masker pelindungnya untuk memberikan pidato yang disiarkan secara nasional, setelah US Electoral College secara formal mengakui kemenangannya atas Presiden Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020, dari kantor transisi Joe Biden di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, Senin (14/12).

## AS Akhirnya Sanksi Turki karena Beli Sistem Rudal S-400 Rusia

Erdogan menyebutkan bila Turki membutuhkan dukungan dari AS sebagai sekutu NATO nya, bukannya hukuman.

WASHINGTON (IM)

- Pemerintah Amerika Serikat (AS) akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia bernilai miliaran dolar Amerika. Penjatuhannya sanksi diumumkan hari Senin waktu Washington.

Langkah pemerintah Presiden Donald Trump ini diperkirakan akan semakin memicu ketegangan antara Washington dan Ankara dalam beberapa minggu menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Apa yang dilakukan Washington kepada sekutunya itu sekaligus mengirim pesan kepada pemerintah asing mana pun untuk mempertimbangkan kesepakatan senjata di masa depan dengan Rusia.

Pada 2017, Presiden Turki Recep Erdogan menengahi kesepakatan senilai USD2,5 miliar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pembelian sistem rudal S-400.

S-400, sistem rudal surface-to-air mobile, diklaim meminimalkan risiko bagi aliansi NATO serta jet tempur siluman F-35, platform senjata paling mahal di Amerika.

Terlepas dari peringatan dari Amerika Serikat dan sekutu

NATO lainnya, Turki menerima yang pertama dari empat baterai rudal S-400 pada Juli 2019. Seminggu kemudian, Amerika Serikat menghentikan Turki, mitra keuangan dan manufaktur, dari program F-35.

Di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi, yang ditandatangani Trump pada Agustus 2017, Turki menghadapi potensi sanksi ekonomi karena menerima sistem rudal Kremlin. Trump sebelumnya enggan menjatuhkan sanksi kepada Ankara.

"Turki adalah sekutu yang berharga dan mitra keamanan regional yang penting bagi Amerika Serikat, dan kami berusaha untuk melanjutkan sejarah kerjasamanya produktif sektor pertahanan selama puluhan tahun dengan menghilangkan hambatan kepemilikan S-400 Turki sesegera mungkin," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan ketika mengumumkan sanksi Washington kepada Ankara, seperti dilansir CNBC, Selasa (15/12).

Sanksi tersebut melarang

semua lisensi ekspor AS dan otorisasi kepada Kepresidenan Industri Pertahanan Republik Turki serta pembekuan aset dan pembatasan visa pada presiden organisasi, Ismail Demir, dan pejabat tinggi lainnya.

"Baiklah, ini tentang waktu yang tepat. Sanksi yang kuat dan dirancang dengan baik sangat lambat," kata Thomas Karako, direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, ketika ditanya tentang sanksi tersebut.

"Detailnya akan sangat berarti. Ini bisa berubah menjadi softball. Jika ingin memberikan sanksi, sanksi itu tidak bisa hanya sekedar tanda," ujar Karako.

Waktu pemberian sanksi, lebih dari setahun setelah pengiriman sistem rudal, dapat berpotensi mengganggu hubungan antara Ankara dan Washington untuk pemerintahan Biden yang akan datang.

Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika memerehkan waktunya, dengan mengatakan bahwa proses penerapan sanksi "sangat serius" dan "konsultatif".

"Butuh waktu untuk menyelesaikan serangkaian masalah yang kompleks ini, termasuk, khususnya, fakta bahwa Turki adalah sekutu NATO, jadi saya tidak akan terlalu banyak membaca tentang waktu ini dan mengapa hari ini dan bukan kemarin atau tiga bulan yang lalu," kata Matthew Palmer, wakil asisten sekretaris di Biro

Urusan Eropa dan Eurasia, selama panggilan telepon dengan wartawan.

Pengumuman sanksi ini muncul datang kurang dari dua bulan setelah ada laporan bahwa militer Turki mulai menguji coba sistem rudal S-400.

Pada bulan Oktober, baik departemen Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri mengancam uji coba sistem rudal tersebut di lepas pantai Laut Hitam Turki.

"Amerika Serikat telah menyatakan kepada Pemerintah Turki, pada tingkat paling senior, bahwa akuisisi sistem militer Rusia seperti S-400 tidak dapat diterima," tulis juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortugus dalam pernyataan yang dikirim melalui email pada saat itu.

"Amerika Serikat telah memperjelas harapan kami bahwa sistem S-400 tidak boleh dioperasikan," imbuh dia.

"Kami keberatan dengan pembelian Turki atas sistem tersebut dan sangat prihatin dengan laporan bahwa Turki akan menjalankannya," kata kepala juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman dalam pernyataan yang dikirim melalui email kala itu.

"S-400, penerus sistem rudal S-200 dan S-300, memulai debutnya pada tahun 2007. Dibandingkan dengan sistem AS, S-400 buatan Rusia diyakini mampu menyerang lebih banyak target, pada jarak

yang lebih jauh dan melawan berbagai ancaman secara bersamaan.

Dalam berbagai upaya untuk mencegah Turki membeli S-400, Departemen Luar Negeri menawarkan untuk menjual sistem rudal Patriot Raytheon pada 2013 dan 2017. Tawaran itu tidak berjalan mulus, karena AS menolak memberikan transfer teknologi dari sistem tersebut kepada Turki.

"Kami telah berulang kali mencoba melalui upaya diplomatik kami untuk menemukan cara untuk menyelesaikan ini dengan cara yang tidak melibatkan penerapan sanksi wajib ini," kata Christopher Ford, asisten sekretaris untuk Keamanan dan Nonproliferasi Internasional, selama panggilan telepon dengan wartawan.

"Kami juga telah berulang kali menawarkan mereka peralatan militer untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional mereka dengan cara yang tidak memicu sanksi dan itu, pada kenyataannya, merupakan jawaban yang lebih baik dalam hal interoperabilitas NATO dari Pasukan Pertahanan Turki. Sayangnya, Turki menolak setiap upaya ini selama beberapa tahun terakhir," kata Ford. "Amerika Serikat tidak punya pilihan."

Meskipun menghadapi potensi sanksi AS, belasan negara telah menyatakan minatnya untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia. ● tom

## Terpapar Covid-19, PM Eswatini Meninggal Dunia

MBABANE(IM)

- Perdana Menteri (PM) Eswatini Ambrose Dlamini meninggal dunia kemarin. Sampai berita ini diturunkan, penyebab utama kematiannya tidak diketahui. Namun, Dlamini sempat positif terpapar virus corona (Covid-19) pada 16 November lalu dan menjalani perawatan intensif di dalam dan di luar negeri.

Pemerintah Eswatini juga menyatakan Dlamini meninggal dunia di sebuah rumah sakit (RS) di Afrika Selatan. Sebelum masuk RS, Dlamini mengaku tidak mengalami gejala apa pun dan merasa sehat. Pada awal Desember lalu, dia dibawa menuju RS di Afrika Selatan dengan harapan dapat sembuh secara lebih cepat.

"Bapak Dlamini telah meninggal dunia selama menjalani perawatan di sebuah RS di Afrika Selatan," kata Wakil PM Eswatini Thamba Masuku tanpa memberikan keterangan lebih rinci, dikutip BBC. "Pemerintah bersama keluarga almarhum akan memberikan keterangan lebih lanjut di kemudian hari," tambah Masuku.

Dlamini bukanlah satu-satunya kepala negara yang positif terjangkit Covid-19. Banyak tokoh dunia yang tidak luput dari serangan virus mematikan itu, mulai raja, perdana menteri, presiden, kanselir, hingga pejabat parlemen. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga sempat positif terkena Covid-19.

Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Mohammad Mirmohammadi, juga terinfeksi Covid-19. Begitu pun dengan Wakil Presiden Iran untuk Urusan Wanita dan Keluarga, Masoumeh Ebtekar; Wakil Menteri Kesehatan Komite Covid-19, Irah Harirchi; dan Kepala Layanan Medis Darurat, Pir-Hossein Koliband.

Mirmohammadi tidak mampu bertahan dan meninggal di usia 71 tahun. Kematiannya disusul Anggota Parlemen Iran

Fatemeh Rahbar yang juga meninggal akibat Covid-19. Dia sempat mengalami koma selama beberapa lama. Ironisnya, Fatemeh baru saja terpilih sebagai Anggota Parlemen Teheran selama sebulan.

Fatemeh merupakan Anggota Parlemen kedua yang meninggal akibat Covid-19 di Iran dan salah satu dari tujuh pejabat pemerintah dan politisi Iran yang meninggal dunia. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Hossein Sheikholeslam juga dalam kondisi kritis dan tidak lama kemudian meninggal.

Pangeran Charles, juga pernah positif Covid-19 dan baru dinyatakan sembuh beberapa pekan kemudian. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas medis dan masyarakat Inggris yang mendukungnya. Pangeran Charles dilaporkan hanya menderita gejala ringan saat sakit.

Kendati sudah sehat, Pangeran Charles tetap waspada dan menaati protokol kesehatan seperti social distancing. Pangeran Albert dari Monaco juga keluar dari ruang isolasi setelah didiagnosis terinfeksi virus corona. Namun, anggota Kerajaan Monaco berusia 62 tahun itu pulih lebih lama daripada Pangeran Charles.

Pangeran Albert dilaporkan positif terinfeksi Covid-19 pada pertengahan tahun ini atau sesaat setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Dia mengaku mengalami gejala mirip penyakit flu. "Saya agak demam, terkadang batuk. Waktu hari pertama yang saya rasakan hanya pilek. Tapi, saya baik-baik saja," kata Albert.

Sebanyak empat anggota Parlemen Prancis juga sempat dirawat di RS akibat terjangkit Covid-19. Pemerintah Prancis telah memperketat peraturan di ruang publik dengan memberlakukan larangan pertemuan pada akhir pekan. "Prioritas kami ialah memperlambat penularan," kata Menkes Olivier Veran. ● gul

## Israel dan Bhutan Bangun Hubungan Diplomasi

NEW DELHI(IM)

- Israel membangun hubungan diplomasi dengan Bhutan. Bhutan merupakan negara mayoritas Budha yang berbatasan dengan India dan berupaya memperluas jaringan diplomasinya.

Kesepakatan Israel dengan negara Himalaya tersebut tampaknya tidak terkait dengan kespakatan yang disponsori Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara Arab dan Muslim.

Meski demikian, para pejabat Israel berusaha menggambarkannya sebagai bukti semakin diterima di luar negeri.

"Perjanjian tersebut setelah beberapa tahun kontak rahasia antara Israel dan Bhutan dengan tujuan membangun hubungan," ungkap Kementerian Luar Negeri Israel.

"Lingkaran pengakuan Is-

rael tumbuh dan berkembang," papar Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi.

"Pembentukan hubungan antara kami dan Kerajaan Bhutan akan menjadi tonggak penting lain dalam memperdalam hubungan Israel di Asia," ujar Ashkenazi.

Bhutan bergantung pada India untuk pedoman kebijakan luar negeri dan pertahanannya sampai perjanjian persahabatan direvisi pada 2007.

Bhutan memelihara hubungan diplomatik dengan sekitar 53 negara.

"Upacara penandatanganan diadakan antara duta besar Israel dan Bhutan untuk India pada Sabtu di kedutaan Israel di New Delhi," ungkap siaran pers bersama yang diposting di situs web Kementerian Luar Negeri Bhutan.

"Pembentukan hubungan diplomatik (akan) menciptakan jalan baru untuk kerjasama antara kedua negara dalam pengelolaan air, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pertanian dan bidang lain yang saling menguntungkan," papar dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik perjanjian tersebut. Dia menambahkan telah ada kontak dengan negara lain yang ingin menjalin hubungan.

Israel dan Maroko pada Kamis sepakat menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang dibantu AS.

Maroko menjadi negara Arab keempat setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan yang menjalin hubungan dengan Israel dalam empat bulan terakhir. ● ans



IDN/ANTARA

### GERHANA MATAHARI DI AS

Seorang pria berpakaian Sinterklas menggunakan kacamata pelindung khusus untuk mengamati gerhana matahari yang terjadi di Amerika Selatan, terlihat di sebagian Chili dan Argentina, di Bariloche, Patagonia, Argentina, Senin (14/12).

## Korsel Ancam akan Kembali Perketat Pembatasan Covid-19

SEOUL(IM)

- Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) mendesak warga untuk mematuhi peraturan pembatasan sosial Covid-19 agar pemerintah tidak perlu memperketat peraturan tersebut untuk menahan gelombang wabah virus korona ketiga di negara ini.

Angka kasus infeksi harian Korsel berada di titik tertingginya setelah Senin (14/12) malam lalu Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korsel (KCDC) mengumumkan 880 kasus baru. Lebih tinggi satu hari sebelumnya yang sebanyak 718 kasus.

Mulai Selasa (15/12), Metropolitan Seoul menutup sekolah selama satu bulan. Pemerintah mulai mendekati tingkat tertinggi peraturan pembatasan sosial yang akan menutup perekonomian terbesar keempat di Asia tersebut.

Selama karantina nasional hanya pekerja esensial yang diizinkan bekerja di kantor. Pertemuan di atas 10 orang dilarang. "Saat sebagian besar warga harus menahan ketidakhnyamanan, untuk mematuhi peraturan, sejumlah orang memicu bahan bakar untuk

penyebaran virus yang lebih parah dengan kecerobohan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab," kata Perdana Menteri Chung Sye-kyu dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

"Mempertimbangkan beban dan dampak peraturan pembatasan sosial tingkat 3, pertama-tama kami harus melihat kebelakang apa kami sudah mematuhi level yang saat ini dengan benar," tambahnya.

Chung mengatakan pemerintah Korsel enggan memberlakukan peraturan pembatasan sosial tingkat 3. Karena "rasa sakit yang tidak dapat ditarik kembali" yang diakibatkannya.

Pejabat kesehatan Korsel mengatakan penyebaran virus di sejumlah klaster baru-baru ini terjadi karena masyarakat melanggar peraturan pembatasan sosial. Termasuk gereja yang melanggar larangan layanan tatap muka. Restoran juga terus buka hingga larut malam walaupun sudah dilarang menerima konsumen makan di tempat setelah pukul 21.00. ● ans



IDN/ANTARA

### PENYUNTIKAN VAKSIN PFIZER/BIONTECH DI CANADA

Seorang tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin penyakit virus korona (Covid-19) Pfizer/BioNTech kepada seorang tenaga pendukung pribadi Anita Quidangen di The Michener Institute, di Toronto, Canada, Senin (14/12).

## PBB Tunjuk Utusan Baru untuk Libya dan Timur Tengah

WASHINGTON(IM)

- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menunjuk utusan baru untuk menengahi konflik di Libya dan Timur Tengah. Pengukuhan terhadap kedua utusan itu menunggu persetujuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (15/12).

Guterres mengajukan utusan khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov untuk menjadi perwakilan PBB di Libya. Dia menggantikan Ghassan Salame yang mengundurkan diri pada Maret lalu.

Posisi Mladenov sebagai utusan khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah bakal digantikan Tor Wennesland. Dia adalah diplomat veteran asal Norwegia. Saat ini Wennesland menjabat sebagai utusan khusus Norwegia untuk perdamaian Timur Tengah.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pertemuan untuk membahas penunjukan kedua diplomat

itu pada Selasa malam. Jika tidak ada selasan, Mladenov dan Wennesland dapat segera menjalankan tugas barunya.

Mladenov telah menjadi utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah sejak 2015. Di Libya, dia ditugaskan menengahi konflik antara Government of National Accord (GNA) yang diakui secara internasional dan Libyan National Army (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar. Sejak Muammar Qaddafi digulingkan pada 2011, Libya terjereb dalam konflik sipil.

Sementara di Timur Tengah, tugas utama Wennesland adalah mengupayakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Saat ini, Israel telah membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara Muslim antara lain Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Baru-baru ini Tel Aviv pun mengumumkan pembukaan relasi dengan Bhutan. ● gul